

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan kegiatan jasa dengan fungsi memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu kegiatan ekonomi yang dimaksud untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi terbaik diantara beberapa alternatif yang ada. Proses dari kegiatan akuntansi menghasilkan sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan pada suatu periode tertentu. Laporan tersebut akan menggambarkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen.

Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting bagi investor dan manajemen sehingga laporan keuangan yang disajikan harus dapat diandalkan. Mengingat pentingnya sebuah pertanggungjawaban dalam laporan keuangan suatu organisasi, maka laporan keuangan harus disusun sesuai data yang akurat dan sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Menurut IAI dalam PSAK No. 1 paragraf 24 tentang penyajian laporan keuangan revisi tahun 2015 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat tindak penyimpangan yang dilakukan pada laporan keuangan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan ini merupakan sebuah Kecurangan Akuntansi.

Menurut Karyono (2013, hlm. 4) mendefinisikan Kecurangan Akuntansi atau *fraud* sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Indikasi terjadinya Kecurangan Akuntansi umumnya dapat terjadi karena adanya dorongan tekanan, kesempatan, dan sikap/rasionalisasi bagi si pelaku.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, 2014 hlm. 377). Dengan adanya pengendalian internal diharapkan aktivitas operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien serta mampu meminimalisir kemungkinan adanya tindak penyimpangan. Jika peran pengendalian internal tidak dijalankan dengan efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesempatan bagi para pegawai yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan melakukan sebuah kecurangan akuntansi.

Kompensasi dapat diartikan sebagai keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai akibat dari pelaksanaan organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya (Hariandja, 2002 hlm. 244). Kompensasi yang diterima dan diolah dengan baik oleh pegawai dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan pegawai. Jika seorang pegawai tidak mendapatkan keadilan dan kelayakan dalam penerimaan kompensasi, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pegawai.

Aturan akuntansi merupakan pedoman bagi organisasi bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal untuk pihak yang berkepentingan (Zainuddin, 2016). Semakin taat organisasi dalam menerapkan aturan akuntansi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi yang dilakukan organisasi.

Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia, dengan peringkat 107 dari 175 negara di dunia (*Transparency International, 2014*). Menurut Wilopo (2006) praktek kecurangan akuntansi di Indonesia yang melibatkan instansi pemerintahan dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, komisi di penyelenggara pemilu, dan DPRD. Bentuk Kecurangan Akuntansi yang umum

dilakukan adalah penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi.

Kecurangan Akuntansi di Indonesia dapat terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta dengan bentuk kecurangan yang hampir sama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Pemeriksaan LKPP Tahun 2014 meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara rinci laporan-laporan tersebut.

Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014, BPK mengungkapkan empat permasalahan yang menyebabkan diberikannya opini pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2014. Permasalahan tersebut terkait dengan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pertama BPK mengungkapkan masalah pada Pencatatan mutasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp 2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi. Permasalahan kedua yaitu utang kepada pihak ketiga di tiga Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung bukti yang memadai. Berikutnya permasalahan ketiga terkait transaksi atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp 5,14 triliun, sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat. Permasalahan keempat mengenai pemerintah yang belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah inkraht untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban.

Opini yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2014 sama dengan opini yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2013. Selama Tahun 2014 pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan Tahun 2013. Tetapi belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan

terkait selisih catatan dan fisik SAL (Saldo Anggaran Lebih), sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada pemeriksaan LKPP Tahun 2014.

Dari fenomena yang disajikan BPK mengungkapkan bahwa terdapat masalah pada pencatatan mutasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp 2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi. Semakin efektif sistem Pengendalian Internal yang diberlakukan dalam organisasi, menandakan semakin rendah kemungkinan terjadinya Kecurangan Akuntansi. Faktanya sistem Pengendalian Internal organisasi publik yang diberlakukan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Akan tetapi terdapat masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan mutasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Hal ini membuktikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin efektif pengendalian internal maka semakin rendah kemungkinan kecurangan akuntansi.

Fenomena diatas ditemukan terdapat utang kepada pihak ketiga di tiga Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung bukti yang memadai. Semakin adil dan layak Kompensasi yang diberikan suatu organisasi, menandakan semakin rendah Kecurangan Akuntansi suatu organisasi. Dengan pemberian kompensasi atau upah yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 bahwa sistem pemberian kompensasi diberlakukan sesuai dengan kinerja aparatur sipil negara, akan tetapi faktanya terdapat Rp 1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan bukti yang menjelaskannya, hal ini mendukung bahwa terdapat kemungkinan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini membuktikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila semakin adil dan layak Kompensasi yang diberikan organisasi kepada pegawai maka Kecurangan Akuntansi akan menurun, begitu pula sebaliknya apabila Kompensasi yang diberikan organisasi buruk maka Kecurangan Akuntansi semakin meningkat.

Selain itu dalam fenomena yang disajikan ditemukan adanya utang kepada pihak ketiga di tiga Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung bukti yang memadai. Dan terdapat pencatatan transaksi atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp 5,14 triliun yang disajikan dalam SAL tidak akurat. Semakin sebuah organisasi taat pada aturan akuntansi yang berlaku menandakan kemungkinan terjadinya Kecurangan Akuntansi semakin rendah. Faktanya pengolahan keuangan negara dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Aturan Akuntansi yang berlaku. Akan tetapi terdapat rincian utang yang keberadaannya tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dengan bukti yang memadai serta terkait penyajian akuntansi yang tidak akuntabilitas dan transparansi. Hal ini membuktikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin efektif Aturan Akuntansi maka semakin rendah Kecurangan Akuntansi.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi telah dilakukan oleh Wilopo (2006), Kusumastuti & Meiranto (2012), Shintadevi (2015), Zainuddin (2016), yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi. Namun berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joseph (2015), Gesare (2016), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh positif antara Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi. Serta hasil penelitian oleh Ahrianti (2015) menyatakan bahwa Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

Penelitian terdahulu mengenai Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi telah dilakukan oleh Kusumastuti & Meiranto (2012), Shintadevi (2015) yang menyatakan bahwa Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi. Namun hasil dari penelitian Wilopo (2006), Ahrianti, dkk (2015), menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Akuntansi.

Penelitian terdahulu mengenai Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi telah dilakukan oleh Wilopo (2006), Shintadevi (2015), Zainuddin (2016), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aturan Akuntansi

berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti & Meiranto (2012) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zainuddin (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Zainuddin (2016) adalah bahwa penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Aturan Akuntansi sedangkan Zainuddin (2016) menggunakan variabel independen yang meliputi Pengendalian Internal dan Budaya Etis Organisasi, dan Aturan Akuntansi. Penelitian terdahulu menggunakan SKPD di Kota Ternate. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan SKPD di DKI Jakarta.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa penelitian dengan variabel yang sama, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai Kecurangan Akuntansi di Satuan Perangkat Kerja Daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi?
- b. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi?
- c. Apakah Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat pencapaian tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi.

- b. Untuk membuktikan pengaruh Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi.
- c. Untuk membuktikan pengaruh Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca serta memperluas teoritis pengetahuan dibidang akuntansi terutama dibidang auditing dan akuntansi forensik dalam menganalisis dan mendeteksi terjadinya Kecurangan Akuntansi, dan dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kecurangan Akuntansi.

- b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Auditor untuk lebih selektif dalam proses auditing serta dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi yang dilakukan instansi publik maupun swasta.

- 2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.